

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pelaksanaan otonomi daerah diperdayakan dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur dan memanfaatkan serta menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dapat dilihat dari bentuk nyata penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang terdiri atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi dengan menyerahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang terjadi di wilayah masing-masing dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu juga terjadi pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemerintah Sumatera Utara mendapatkan tugas dan wewenang sepenuhnya untuk

mengatur jalannya segala urusan pemerintahan dan kepentingan yang ditujukan untuk melayani masyarakat Sumatera Utara.

Untuk menjalankan seluruh tugas dan wewenang secara menyeluruh, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan pemerintah daerah, dan kebijakan tersebut membutuhkan pendanaan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Seluruh kegiatan pendanaan tersebut perlu dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membantu berdirinya kebijakan pemerintah yang berkaitan erat dengan pengelolaan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Suplus Defisit Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan dimana harus ada standar atau acuan yang nantinya bisa dipergunakan untuk melihat kinerja dalam periode tertentu. Dengan adanya standar atau acuan atas kinerja keuangan, otomatis akan ada juga pengukuran kinerja keuangan pemerintahan yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut nantinya diharapkan dapat di ketahui seberapa mandiri, efektif, efisien dan akuntabelnya pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bentuk dari penilaian kinerja keuangan yaitu berupa rasio keuangan yang diperoleh dari perhitungan LRA dan Neraca. Ketika melakukan penilaian, ada indikator

kerja terdiri dari 2 tolak ukur penilaian kinerja. Pertama adalah penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target (anggaran) dan kedua adalah efektivitas program, efisiensi belanja dan juga pemerataan dan keadilan. Tolak ukur penilaian kinerja tersebut digunakan karena nantinya tolak ukur tersebut dapat memperlihatkan seberapa besar kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah agar mampu melayani masyarakat dengan baik.

Ketika melakukan rasio keuangan pada LRA, rekening pendapatan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, acuan penilaian yang digunakan adalah jika $X > 100\%$ itu berarti instansi daerah sudah efektif atau efisien dalam menggunakan PAD untuk kelangsungan kegiatan instansi daerah. Apabila $X < 100\%$ maka instansi daerah belum efektif atau efisien dalam menggunakan PAD yang ada. Dan jika $X = 100\%$ maka dikatakan efektif atau efisien yang berimbang, sedangkan acuan penilaian yang digunakan ketika mengukur tingkat kemandirian keuangan untuk mengetahui pola hubungan antara instansi daerah dengan pemerintah pusat (sebagai pihak luar instansi daerah) adalah jika rasio kemandirian menunjukkan angka 0-25% maka kemandirian keuangan sangat rendah dan pola hubungan dengan pemerintah pusat bersifat instruktif (campur tangan pemerintah pusat berperan besar). Kemudian jika rasio kemandirian menunjukkan angka 25-50% maka kemampuan keuangan dikatakan rendah dan pola hubungan dengan pemerintah pusat bersifat konsultatif. Untuk rasio kemandirian yang menunjukkan angka 50-75%, maka kemandirian keuangan dikatakan sedang dan memiliki pola hubungan yang bersifat partisipatif. Sedangkan rasio

kemandirian dengan angka 75-100%, maka dikatakan memiliki kemampuan keuangan tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif (keterlibatan pemerintah pusat rendah).

Dengan adanya analisis kinerja keuangan dengan menerapkan rasio keuangan di atas, BPKAD Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat semakin meningkatkan efektifitas dan efisien untuk memberikan layanan lebih baik untuk masyarakat. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena adanya perhitungan rasio keuangan pada LRA dan Neraca yang memiliki hasil analisa saling terkait bisa membantu pemerintah untuk lebih fokus pada tujuan dan sasaran program yang selama ini di bebaskan pada pemerintah daerah.

Analisis kinerja keuangan dengan perhitungan rasio keuangan diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat dimana nantinya akan digunakan sebagai acuan penentuan kebutuhan dan merencanakan kinerja di masa yang akan datang. Mengingat permasalahan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara (sebagai bendahara umum) yaitu perencanaan program dan kegiatan yang ada belum menggunakan data yang akurat. Selain itu BPKAD Provinsi Sumatera Utara (sebagai bendahara umum) juga memiliki masalah lain yaitu berupa tuntutan dimana harus bisa meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat maupun instansi lainnya.

1.2. Identifikasi Masalah

Hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini digunakan untuk tolak ukur dalam : menilai kinerja keuangan daerah jika dilihat dari Rasio

Likuiditas, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Dengan digunakannya analisis keuangan tersebut, maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kinerja keuangan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana nantinya akan menggambarkan kondisi Kinerja Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kas Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Penulis mengangkat masalah tentang penilaian kinerja keuangan BPKAD (bendahara umum) Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui seberapa mandiri, efektif, efisien dan akuntabelnya dengan melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, penulis menyusun tugas akhir dengan judul :

“ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA PROVINSI SUMATERA UTARA”.

Analisis LRA dan Laporan Neraca pada laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatra Utara menggunakan rasio Likuiditas, Rasio Efektif dan Rasio Efisiensi yang nantinya secara keseluruhan rasio tersebut akan menampilkan kinerja keuangan selama 3 tahun terakhir.

1.3.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah Rasio Likuiditas, Rasio Efektif dan Rasio Efisiensi menggambarkan kinerja keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2020?
2. Apakah gambaran kinerja keuangan tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan BPKAD kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara atau kepada instansi lainnya?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020 dengan menggunakan Rasio Likuiditas, Rasio Efektif dan Rasio Efisiensi.
2. Untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan dan kemampuan BPKAD untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara atau Kepada instansi lain.

1.5. Manfaat Penelitian

Bagi instansi :

1. Dapat digunakan sebagai acuan penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

2. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sektor publik dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Bagi penulis dan pembaca :

Digunakan sebagai penerapan ilmu dari materi-materi yang meliputi perhitungan rasio keuangan yang digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan.